



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1777);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana berapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor).
25. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar 2.813.094.718.788,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 438.891.965.919,00, (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.589.622.349,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.909.227.223,00 (Seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.617.716.347,00 (Dua belas miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.775.400.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.589.622.349,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Rp. 2.200.000.000,00 (Dua miliar dua ratus juta rupiah);
- b. Pajak Air Tanah Rp. 361.085.293,75 (Tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh lima rupiah)

- c. Pajak Sarang Burung Wallet Rp. 10.867.500,00 (Sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 1.491.234.820,67 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh koma enam tujuh rupiah);
- e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 24.082.761.379,00 (Dua puluh empat miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua miliar);
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 125.683.118.280,58 (Seratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh koma lima delapan rupiah)
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 33.546.446.675,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 36.214.108.400,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus empat belas juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah)

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.909.227.223,00 (Seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 159.910.645.323,00 (Tujuh milyar empat ratus juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 4.006.385.400,00 (Empat milyar enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 2.992.196.500,00 (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.617.716.347,00 (Dua belas milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 12.617.716.347,00 (Dua belas milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)

Pasal 8

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.775.400.000,00 (Tiga milyar

tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Pendapatan Bunga Rp. 1.900.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah); dan
- c. Pendapatan BLUD Rp. 625.400.000,00 (Enam ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.334.375.424.869,00 (Dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.232.850.666.000,00 (Dua triliun dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. DAU; dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 176.357.457.000,00 (Seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.930.807.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 171.899.500.000,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.342.769.427.000,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 533.893.475.000,00 (Lima ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.524.758.869,00 (Seratus satu milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.827.328.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 302.000.000,00 (Tiga ratus dua juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah); dan
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp.302.000.000,00 (Tiga ratus dua juta rupiah)
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.525.328.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.781.914.021.448,00 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat belas juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.098.727.411.778,84 (Dua triliun sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma delapan empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.274.077.172.610,62 (Satu triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh koma enam puluh dua rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 751.786.994.475,22 (Tujuh ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua dua rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.449.712.191,00 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.657.532.502,00 (Enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratusm tiga puluh ribu lima ratus dua rupiah)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.274.077.172.610,62 (Satu triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh koma enam dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - f. Belanja Pegawai BOSP
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 783.745.450.607,91 (Tujuh ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh koma sembilan satu rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.871.803.004,14 (Tiga ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga ribu empat koma satu empat rupiah)
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.464.400.722,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 349.815.079,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.053.600.000,00 (Satu milyar lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 73.592.103.197,57 (Tujuh puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh koma lima tujuh rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 751.786.994.475,22 (tujuh ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma dua dua rupiah) terdiri dari
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 328.727.882.970,78 (Tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh delapan rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 221.665.547.052,00 (Dua ratus dua puluh satu milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.959.911.931,00 (Empat milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.305.353.501,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.624.648.260,00 (tujuh belas milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.066.370.000,00 (Tujuh puluh dua milyar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 71.437.280.760,44 (tujuh puluh

satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh koma empat empat rupiah)

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.449.712.191,00 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 62.657.532.502,00 (Enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.650.000.000,00- (Empat belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.002.532.502,00 (Satu milyar dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 756.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Rupiah)

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 310.020.899.875,56 (Tiga ratus sepuluh milyar dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 91.720.600.500,56 (Sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus ribu lima ratus koma lima enam rupiah)
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.399.033.392,00 (Seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.881.385.983,00 (Delapan puluh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.209.184.000,00 (Tiga belas milyar dua ratus sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 60.696.000,00 (Enam puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pasal 21

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.700.285.174,60 (Tiga belas milyar tujuh ratus juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat koma enam nol rupiah)

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.359.195.424.619,00(Tiga ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, terdiri) atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.998.882.059,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 332.466.542.560,00 (Tiga ratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Pasal 23

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (Nol Rupiah)

Pasal 25

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.180.697.340,00 (Tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 26

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Suplus sebesar Rp. 31.180.697.340,00 (Tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah),
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.-31.180.697.340,00 ((Tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah),

Pasal 27

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

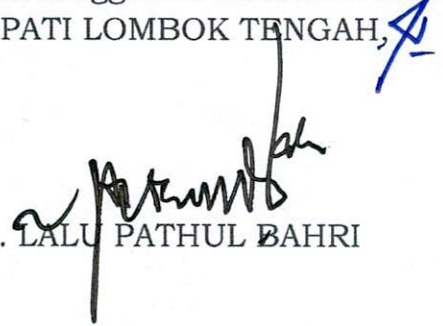
Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


LALU FIRMAN WIJAYA



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	438.891.965.919,00
4.1.01	Pajak Daerah	255.589.622.349,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.200.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.200.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.200.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	361.085.293,75
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	361.085.293,75
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	361.085.293,75
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.867.500,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.867.500,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.867.500,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.491.234.820,67
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	1.491.234.820,67
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	1.491.234.820,67
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.082.761.379,00
4.1.01.15.01	PBBP2	24.082.761.379,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	24.082.761.379,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	32.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	32.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	125.683.118.280,58
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	41.767.383.724,35
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	37.607.857.744,82
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.159.525.979,53
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	31.555.863.711,83
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	31.555.863.711,83
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	46.336.116.863,77
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	34.766.639.569,14
4.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel	275.671.875,52
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	9.776.391.224,41
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	1.203.079.915,40
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	314.334.279,30
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	1.762.629.507,45

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.762.629.507,45
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.261.124.473,18
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	3.642.079.900,99
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	251.898.052,43
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	39.953.452,17
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	327.193.067,59
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	33.546.446.675,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	33.546.446.675,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	33.546.446.675,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	36.214.108.400,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	36.214.108.400,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	36.214.108.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	166.909.227.223,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	159.910.645.323,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	152.510.028.998,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	68.821.194.548,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	83.688.834.450,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	394.074.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	394.074.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	671.100.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	671.100.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	6.335.442.325,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	276.051.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	6.059.391.325,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.006.385.400,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.770.581.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.416.600.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	348.981.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	497.424.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	80.400.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	417.024.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	67.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	64.240.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	237.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	237.600.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	369.540.400,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	101.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	183.040.400,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	85.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.992.196.500,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.244.312.500,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.244.312.500,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	747.884.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	747.884.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.617.716.347,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.617.716.347,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.617.716.347,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.617.716.347,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.775.400.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.250.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.250.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.250.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.900.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.900.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	625.400.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	575.400.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	575.400.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	50.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	50.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.334.375.424.869,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.232.850.666.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	176.357.457.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	176.357.457.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	176.357.457.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.930.807.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.930.807.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.930.807.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	171.899.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.01	DBH Pajak	109.253.310.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.600.813.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.126.626.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	94.525.871.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	62.646.190.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	61.601.591.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.247.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.024.352.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.342.769.427.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.145.182.085.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	1.145.182.085.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	197.587.342.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	38.680.241.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	93.968.417.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.083.692.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	8.454.992.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	533.893.475.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	97.881.637.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	5.512.957.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	798.285.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	429.638.000,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	502.452.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.824.869.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.851.552.000,00
4.2.01.09.01.0080	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate	23.296.580.000,00
4.2.01.09.01.0087	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate	5.978.820.000,00
4.2.01.09.01.0089	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate	19.686.484.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	2.000.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	436.011.838.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	114.029.120.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.545.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	222.220.832.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.131.299.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.670.200.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.699.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.613.706.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	706.030.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	25.102.100.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.891.011.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.476.230.000,00
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.525.600.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.524.758.869,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	101.524.758.869,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	101.524.758.869,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.278.492.019,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	72.724.255,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	47.173.542.595,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.827.328.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	302.000.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	302.000.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	302.000.000,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	302.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.525.328.000,00
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	39.525.328.000,00
4.3.03.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	39.525.328.000,00
4.3.03.03.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	39.525.328.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.813.094.718.788,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.098.727.411.778,84
5.1.01	Belanja Pegawai	1.274.077.172.610,62
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	783.745.450.607,91
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	582.291.566.948,51
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	389.340.109.392,02
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	192.951.457.556,49
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.160.433.438,74
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	41.444.131.763,15
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.716.301.675,59
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.036.246.949,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.036.246.949,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.265.841.669,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.247.701.669,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.140.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.096.993.341,27
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.307.985.323,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.789.008.018,27
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35.800.736.798,77
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.084.999.725,55
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.715.737.073,22
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.067.739.759,80
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.027.219.979,80
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	40.519.780,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.751.196,82
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.374.517,33
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.376.679,49
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	41.663.276.171,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.170.036.571,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.493.239.600,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.417.324.991,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.097.705.005,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	319.619.986,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.251.974.972,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.293.160.080,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	958.814.892,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.664.564.372,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.482.483.847,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.182.080.525,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	387.871.803.004,14
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	120.733.122.367,75
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	116.342.252.184,20
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.390.870.183,55
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	267.138.680.636,39
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	110.000.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	18.054.264,68
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	543.375,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	74.561.741,03
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.204.138.068,95

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.600.000.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.284.155.913,98
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.677.322.333,75
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.810.705.420,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.703.700,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.555.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	364.723.316,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	103.980.000,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.020.000,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.350.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.212.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.880.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.477.020,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	112.215.625,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	27.394.200,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	248.806.174.900,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.432.049.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.416.064.758,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.464.400.722,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.323.510,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.323.510,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.915.440,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.915.440,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	143.967.600,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	143.967.600,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	227.311.266,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	227.311.266,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.676.437.906,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	139.124.030,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.559.896,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.679.776,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.523.074.204,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.905.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.905.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	349.815.079,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	120.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	120.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	22.932.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	22.932.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	192.462.044,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	192.462.044,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	281.232,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	281.232,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	812,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	812,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.503.680,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.503.680,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.111,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.111,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.160,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.160,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	0,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	0,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	73.592.103.197,57
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	73.592.103.197,57
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	73.592.103.197,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.786.994.475,22
5.1.02.01	Belanja Barang	328.727.882.970,78
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	328.256.591.467,78
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.530.385.518,97
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.813.216,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.822.503.730,27
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.554.613,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	874.032,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	44.705.092,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.557.690.205,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	195.441.124,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	99.424.417,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	977.035.386,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	42.735.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	43.743.465,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	6.843.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	59.875.443,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.653.800.179,80
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	201.516.672,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.780.656.927,55
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	227.310.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.607.491.700,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.482.946.231,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.112.995.210,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	335.646.097,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	262.447.609,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	482.879.340,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	103.576.156,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	15.269.752.812,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	625.730.240,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	207.781.587.478,20
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.482.883.187,99
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	414.561.210,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	651.830,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	88.302.863,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.827.979.430,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	42.112.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.872.311.678,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	96.911.280,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	426.828.180,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.463.725,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	39.671.502,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	16.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	85.321.400,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	127.265.260,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	373.367.027,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	34.486.694,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	34.486.694,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	436.804.809,00
5.1.02.01.04.0034	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	3.298.246,00
5.1.02.01.04.0110	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	6.575.400,00
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	782.184,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.816.709,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	416.332.270,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	221.665.547.052,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	98.297.255.887,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	65.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.697.647.100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.275.719.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	189.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.251.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.680.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.340.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	15.309.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	235.900.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	756.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.262.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.787.575.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	923.517.600,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	789.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	67.635.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	965.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.930.949.306,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.956.380.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.493.708.160,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	396.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	84.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	23.100.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	259.260.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	56.960.540,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	842.560.029,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	55.795.800,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	378.100.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	165.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.910.750.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	271.948.900,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.299.400.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.429.900,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	607.276.002,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.740.744.654,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	423.730.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.301.475.282,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	258.318.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.281.900.096,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	11.501.651.280,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	650.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	23.450.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.032.075.238,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	921.508.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.712.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	85.750.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	103.640.810.992,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	101.383.228.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	329.280.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.607.376.922,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	320.925.270,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.499.104.157,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	160.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	473.455.720,00
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	4.552.200,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.861.096.237,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.223.657.383,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.549.608.943,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	574.048.440,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	29.332.121,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	29.332.121,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.076.561.678,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	205.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.341.023.543,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	530.538.135,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	476.983.750,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	426.983.750,00
5.1.02.02.09.0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataaan	50.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	200.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	150.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.221.841.084,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.379.087.084,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.439.604.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.218.480.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	184.670.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.959.911.931,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.974.391.931,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	55.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	77.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	27.500.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	220.400.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.166.750.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	551.300.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	157.351.931,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.240.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	105.710.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	513.100.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35.040.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	979.520.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	979.520.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.305.353.501,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.305.353.501,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.323.402.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.981.951.501,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.624.648.260,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.624.648.260,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.643.528.260,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	14.910.000.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	71.120.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	72.066.370.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	68.466.370.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	67.006.120.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.460.250.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	3.000.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	3.000.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	600.000.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	600.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.437.280.760,44
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.437.280.760,44

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.437.280.760,44
5.1.03	Belanja Bunga	9.449.712.191,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	9.449.712.191,00
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	9.449.712.191,00
5.1.03.01.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	9.449.712.191,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.657.532.502,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.650.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.660.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.660.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.240.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.240.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	200.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	200.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	325.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	47.005.000.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	22.400.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	22.400.000.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	19.655.200.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	19.655.200.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.949.800.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.949.800.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	756.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	756.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	756.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	756.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2	BELANJA MODAL	310.020.899.875,56
5.2.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	750.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	750.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	750.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.720.600.500,56
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	559.052.550,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	559.052.550,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	458.260.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	19.557.390,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	81.235.160,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	19.521.416.088,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	19.521.416.088,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.539.893.428,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	11.988.214.664,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	446.824.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	452.863.375,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	34.500.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.059.120.621,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	281.590.354,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.320.500,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.320.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	273.269.854,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	13.269.854,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	260.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	108.202.866,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	108.202.866,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	108.202.866,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.463.964.790,56
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	647.801.402,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	647.801.402,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.705.684.790,56
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.282.743.958,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	681.338.691,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.559.281.716,56
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	182.320.425,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	110.478.598,00

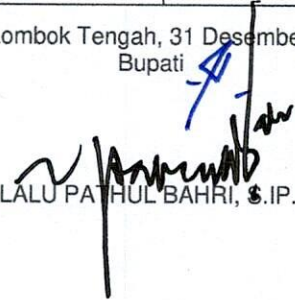
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	22.317.400,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	74.475.198,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.686.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	629.736.634,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	499.714.613,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	287.583.074,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	102.093.296,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	6.310.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	103.728.243,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	130.022.021,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	130.022.021,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.881.933.865,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.196.037.542,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.870.801.863,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.342.383.954,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	7.527.300,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	152.250.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	5.823.074.425,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	12.685.896.323,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	12.685.896.323,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.027.586.969,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	108.371.119,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	389.190,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	107.981.929,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	9.918.007.416,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	9.918.007.416,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.208.434,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.208.434,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.789.810.649,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.556.770.541,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	765.115.410,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.791.655.131,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.233.040.108,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	396.973.800,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	629.023.438,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.207.042.870,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	17.809.870,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	17.809.870,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	17.809.870,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	266.933.955,00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	266.933.955,00
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	266.933.955,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	140.294.910,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	140.294.910,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	121.392.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	18.902.910,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	19.915.068,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	19.915.068,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.352.296,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	4.562.772,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	17.593.000.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	17.193.000.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	16.493.000.000,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	700.000.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	400.000.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	400.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.419.351.932,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.419.351.932,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.419.351.932,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.399.033.392,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	122.976.678.379,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.976.678.379,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	78.146.003.469,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	40.471.941.422,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	707.507.513,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.728.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.673.225.975,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	150.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	297.744.813,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	297.744.813,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	297.744.813,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	124.610.200,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	124.610.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	124.610.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.881.385.983,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	61.273.575.829,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	58.092.475.829,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	55.942.475.829,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.150.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.181.100.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.991.100.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	190.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.199.045.500,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15.199.045.500,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	15.199.045.500,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.376.364.654,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.000.047.483,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.000.047.483,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.197.185.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.000.000.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	197.185.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	1.179.132.171,00
5.2.04.03.09.0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	1.179.132.171,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	18.525.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	18.525.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	18.525.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	13.875.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	13.875.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	13.875.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.209.184.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.179.500.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.179.500.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.179.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	499.684.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	499.684.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	499.684.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.530.000.000,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	11.530.000.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	10.130.000.000,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	1.400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.696.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	60.696.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.696.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	60.696.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.700.285.174,60
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.700.285.174,60
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	13.700.285.174,60
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	13.700.285.174,60
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	13.700.285.174,60
5.4	BELANJA TRANSFER	359.465.424.619,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	26.998.882.059,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	25.258.962.235,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.258.962.235,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.258.962.235,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.739.919.824,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.739.919.824,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.739.919.824,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	332.466.542.560,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	332.466.542.560,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	318.372.663.200,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	318.372.663.200,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	14.093.879.360,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	14.093.879.360,00
	Jumlah Belanja	2.781.914.021.448,00
	Total Surplus/(Defisit)	31.180.697.340,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.180.697.340,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	31.180.697.340,00
6.2.07.01	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	31.180.697.340,00
6.2.07.01.04	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	31.180.697.340,00
6.2.07.01.04.0001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB	31.180.697.340,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.180.697.340,00
	Pembiayaan Netto	-31.180.697.340,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Bupati


H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP